BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara sederhana pendidikan Islam adalah proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan dan pengembangan potensinya, guna mencapai kecerdasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Berdasarkan batasan ini, pendidikan sekurang-kurangnya mengandung lima unsur penting, yaitu 1) Upaya dalam pendidikan Islam dilakukan secara bertahap, berjenjang, terencana, terstruktur, sistemik, dan terus-menerus dengan cara transpormasi dan internalisasi il<mark>mu pengetahuan dan</mark> nilai Islam pada peserta didik ; 2) Materi yang diberikan kepada peserta didik adalah ilmu pengetahuan dan nilai Islam, yaitu pengetahuan dan nilai yang diturunkan dari Tuhan (*Ilahiyah*).; 3) Pendidikan diberikan kepada peserta didik sebagai subjek dan objek pendidikan; 4) tugas pokok pendidikan adalah memberikan pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensi peserta didik agar terbentuk dan berkembang daya kreativitas dan produktivitasnya tanpa mengabaikan potensi dasarnya; dan 5) Tujuan akhir pendidikan Islam adalah terciptanya *insan kamil* (manusia sempurna).¹

Seiring dengan itu, pendapat lain mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Bila disingkat, pendidikan Islam ialah bimbingan terhadap seseorang agar menjadi Muslim semaksimal mungkin. Pendidikan adalah upaya untuk mengembangkan bakat dan kemampuan individu, sehingga potensi-potensi kejiwaaannya itu dapat diaktualisasikan secara sempurna. Potensi-potensi itu sesunggunya merupakan kekayaan dalam diri manusia yang sangat berharga.²

Dahulu bangsa-bangsa di dunia selalu memburu kekayaan material, karena kekayaan material tersebut dianggap sebagai basis, lambang, dan wujud

¹ Abdul Mujib, *Imu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hal. 27-28.

² A. Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islami*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 32.

keunggulan dari suatu bangsa terhadap bangsa lain. Namun sekarang ini, basis keunggulan di antara bangsa-bangsa bukan lagi terletak pada kekayaan material semata, melainkan pada hal-hal yang lebih tinggi, yaitu keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi canggih. Bangsa-bangsa besar modern sangat menyadari benar betapa pentingnya kekayaan sumber daya manusia. Mereka memberikan perhatian yang sangat besar terhadap faktor manusia tersebut. Dengan kata lain kalau dulu perhatian sangat diarahkan pada sumber daya material, sekarang keadaannya justru berubah sama sekali dan beralih pada sumber daya non material, yaitu manusia itu sendiri. Sebab manusialah yang mampu mengelola potensi sumber daya material tersebut menjadi kekayaan aktual. Bahkan lebih dari itu, suatu bangsa yang telah berhasil dalam melakukan riset-riset ilmiah dan melahirkan penemuan-penemuan di bidang Iptek, seakan mempunyai senjata yang sangat ampuhnya untuk menguasai bangsa-bangsa yang lemah. Sebab mereka dapat menguasai sistem berpikir dan pola kecenderungan kelompok yang lemah itu.³

Bagi bangsa Indonesia, kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagaimana tersebut di atas tampaknya tertinggal jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jepang, Korea, dan negara-negara lain di kawasan Asia, misalnya jauh lebih berkualitas sumber daya manusianya dibandingkan dengan bangsa Indonesia, karena mereka lebih dahulu memperhatikan masalah pendidikan. Sementara itu, bangsa-bangsa di kawasan benua Erofa dan Amerika, seperti Belanda, Jerman, Prancis, Amerika, dan sebagainya perhatian terhadap masalah pendidikan jauh lebih tinggi lagi. Sementara bangsa Indonesia baru menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pendidikan dimulai pada perlita keempat, yaitu sekitar tahun 80-an, sehingga ketertinggalan bangsa kita dibandingkan bangsa-bangsa lain demikian jauh.⁴

Disadari bahwa arah pendidikan suatu bangsa atau negara selalu didasarkan pada ideologi bangsa itu sendiri. Setiap negara dan pemerintahnya akan terus berupaya keras mendarahdagingkan ideologinya kepada seluruh warga

³ Muhammad Amin, Konsep Masyarakat Islam Upaya Mencari Identitas dalam Era Modernisasi, (Jakarta: Fikahati Aneksa, 1992), cet. Ke-1, hal. 93.

⁴ Abuddin Nata, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), hal. 2-3.

negaranya, dan akan berupaya menolak bahkan menghancurkan ideologi lain di luar mereka, terutama yang bertentangan dengan ideologi mereka.⁵ Dalam hubungan ini paradigma pendidikan Islam dapat diartikan sebagai suatu kontruksi pengetahuan yang memungkinan kita memahami realitas pendidikan Islam sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan hadits.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, berbagai aspek pendidikan seperti tujuan, kurikulum, guru, metode pendekatan, pola hubungan guru dan murid, sarana dan prasarana, evaluasi dan sebagainya akan dilihat dari paradigma ajaran Islam. Paradigma pendidikan Islam tersebut selanjutnya digunakan untuk mengarahkan, membina, dan mengembangkan pendidikan. Dengan cara demikian, jati diri pendidikan Is<mark>lam akan tampak je</mark>las dan tidak akan terombangambing oleh brbagai pengaruh ideologi, paham, dan lain-lain yang yang datang dari luar. Penerimaan pendidikan Islam terhadap berbagai paham dari luar bisa saja dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan paradigma tersebut.⁶

Dari berbagai model pendidikan Islam yang ada di Indonesia adalah madrasah yang merupakan salah satu lembaga yang tumbuh dan berkembang dari akar budaya masyarakat Indonesia. Umumnya, madrasah atau sekolah Islam mempunyai model dan karakteristik tersendiri, namun dewasa ini status madrasah telah bergeser dari paradigma lama yang cenderung hanya mengutamakan pengajaran pendidikan agama dan terkesan sebagai lembaga pendidikan kelas kedua atau pendidikan masyarakat kelas pinggiran, menjadi paradigma baru yaitu sekolah umum yang berciri khas agama Islam yang kedudukannya setara dengan lembaga pendidikan umum setingkat lainnya serta berperan aktif dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang maha hal ini lahir karena pengaruh globalisasi yang melanda negeri ini beberapa tahun kebelakang.

Di sisi lain, konsekwensi dari pengakuan tersebut harus dibayar dengan target produktivitas yang maksimal dan bermutu, baik IMTAK maupun IPTEKnya. Dalam mencapai target tersebut, fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi harus

⁵ *Ibid*, hal. 4. ⁶ *Ibid*, hal. 4.

diaplikasikan dan terefleksi pada setiap elemen madrasah; seperti kurikulum, administrator, peserta didik terutama gurunya sebagai pendidik.

Pendidikan di madrasah merupakan pendidikan yang sengaja didirikan dan diselenggarakan dengan hasrat dan niat (rencana sungguh-sungguh) untuk mengejawantahkan ajaran nilai-nilai Islam, sebagaimana tertuang dalam visi, misi, tujuan, program kegiatan mapun praktek pelaksanaan kependidikannya. Madrasah merupakan salah satu sekolah yang bertujuan mengembangkan pendidikan bercirikas keislaman.

Di sinilah kepala sekolah mempunyai peranan sebagai pusat pengambilan keputusan menentukan sistem atau aturan pelaksanaan pendidikan dan pencapaian tujuan sekolah yang telah ditentukan bersama. Sedangkan guru merupakan ujung tombak pelaksanaan dari keputusan dan kebijakan yang ditetapkan kepala sekolah. Menurut Islam, pelaksanaan pendidikan (berbasis) agama itu merupakan perintah dari Tuhan yang merupakan ibadah.

Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan tingkat satuan pendidikan yang harus memiliki dasar kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan pendidikan berkaitan dengan masalah kepala sekolah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru dalam situasi yang kondusif. Prilaku kepala sekolah yang positif dapat mendorong, mengarahkan, dan memotivasi seluruh warga sekolah untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah.

Akan tetapi permasalahan Apendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang, jenis dan satuan pendidikan. Beberapa fakta yang menunjukkan bahwa kualitas pendidikan kita masih rendah, hal ini terlihat jika dibandingkan dengan negara lain. Badan Program Pembangunan di bawah PBB (United Nations Development Programme/UNDP) dalam laporan Human Development Report 2016 mencatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2015 berada di

⁷E. Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksrasa, 2015), hal. 17.

peringkat 113, turun dari posisi 110 di 2014. Rendahnya mutu pendidikan Indonesia juga tercermin pada kesulitan perubahaan mencari tenaga kerja.

Sekolah merupakan institusi paling depan dalam menjalankan proses pendidikan. Pendidikan secara makro pada akhirnya akan bermuara pada sekolah melalui pembelajaran. Kepala sekolah sangat berperan dalam menggerakkan berbagai komponen di sekolah sehingga proses belajar mengajar di sekolah itu berjalan dengan baik.⁸

Berdasarkan wawancara dengan Waka Kesiswaan, perwujudan budaya religius di SMUAl-Ittihad ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran peserta didik terhadap pengamalan agama. Misalnya ketika pelaksanaan shalat fardu berjamaah, mereka harus selalu diserukan oleh para penanggung jawab asrama; ketika acara pengajian dimulai ia datang terlambat, kadang-kadang berdiam diri di kamar masing-maisng; ketika diminta untuk membiasakan diri dalam membaca al-Quran, masih banyak peserta didik yang malas untuk membacanya; dan ditambah lagi banyaknya peserta didik yang masih nakal-nakal, mulai dari mencoret-coret tembok sekolah dengan kata-kata yang tidak baik, bahkan dalam bebicara pun masih ada siswa yang melanggar aturan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin mencoba meneliti lebih dalam tentang implementasi budaya religius yang terjadi di SMA Al-Ittihad Karangtengah Cianjur dengan judul penelitian: Manajemen Peningkatan Profesionalisme Guru (Studi tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah SMA Al-Ittihad Karangtengah Cianjur).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian tersebut di atas, maka fokus utama penelitian ini adalah "Kemampuan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru melalui manajemen kinerja berbasis budaya religius di SMA Al-Ittihad Karangtengah Cianjur. Sedangkan sub fokus penelitian ini adalah:

⁸ Budi Suhardiman, *Studi Pengembangan Sekolah Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 1.

- 1. Apa program yang direncanakan untuk meningkatkan profesionalisme guru di SMA Al-Ittihad Karangtengah Cianjur?
- 2. Bagaimanakah pengorganisasian peningkatan profesionalisme guru di SMA Al-Ittihad Karangtengah Cianjur?
- 3. Bagaimanakah pelaksanaan peningkatan profesionalisme guru di SMA Al-Ittihad Karangtengah Cianjur?
- 4. Bagaimana kontrol pelaksanaan profesionalisme guru di SMA Al-Ittihad Karangtengah Cianjur?
- 5. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan profesionalisme guru?
- 6. Bagaimana dampak dar<mark>i dukungan dan ha</mark>mbatan terhadap peningkatan profesionalisme guru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada peru<mark>musan masalah d</mark>i atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk:

- Mengetahui program yang direncanakan untuk meningkatkan profesionalisme guru di SMA Al-Ittihad Karangtengah Cianjur.
- 2. Mengetahui pengorganisasian peningkatan profesionalisme guru di SMA Al-Ittihad Karangtengah Cianjur.
- 3. Mengetahui pelaksanaan peningkatan profesionalisme guru di SMA Al-Ittihad Karangtengah Cianjur.
- 4. Mengetahui kontrol pelaksanaan profesionalisme guru di SMA Al-Ittihad Karangtengah Cianjur.
- 5. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan profesionalisme guru.
- 6. Mengetahui cara memperkuat dukungan dan menghilangkan hambatan dalam meningkatkan profesionalisme guru.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritik, penelitian ini akan berguna

dalam memperoleh tambahan keilmuan yang berkaitan dengan manajemen peningkatan profesionalisme guru di lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya dapat dijadikan bahan masukan bagi pengelola lembaga pendidikan Islam dalam menerapkan manajemen perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian dan pengawasandalam meningkatkan profesionalisme guru.

Adapaun secara praktis, hasil penelitian ini menjadi bahan masukan yang berharga bagi pemerintah, para praktisi pendidikan, kepala sekolah, para pendidik dan para pemerhati pendidikan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pengelola sekolah guna menemukan kelemahan dan kekurangan dalam melaksanakan manajemen peningkatan profesionalisme guru di SMA Al-Ittihad, selain itu pula dapat dijadikan solusi terbaik dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan profesionalisme guru secara terus-menerus, bukan hanya untuk kebutuhan dan kepentingan sesaat akan tetapi diharapkan berjalan secara berkesinambungan.

E. Penelitian Terdahulu

Karya tulis yang berkenaan dengan kepemimpinan memang sudah cukup banyak, mulai dari karya-karya terdahulu sampai dengan karya-karya terbaru, mulai dari konsep kepemimpinan formal hingga kepemimpinan non formal, sudah menghiasi pustaka-pustaka dan toko-toko buku yang ada. Namun hasil penelitian berupa tesis yang berkenaan dengan kepemimpinan kepala sekolah dalam upaya mengatur peningkatan profesionalisme guru, apa lagi khususnya yang ada di Pesantren Al-Ittihad, Karangtengah Cianjur, tampaknya belum ada di dalam kepustakaan. Penelitian terdahulu dicantumkan untuk mengetahui perbedaan penelitian, sehingga tidak terjadi plagiasi (penjiplakan) karya ilmiah dan untuk mempermudah fokus apa yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapaun beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru (Studi Multisitus di MTsN Tunggangri Kalidawir dan MTsN Darul Falah Bendiljati Kulon Sumbergempol Tulung Agung). Tesis Nurul Hidayati Program Pascasarjana IAIN Tulungagung, tahun 2015.

Penelitian ini mempertanyakan pendekatan, motivasi dan strategi kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru.

Hasilnya pendekatan yang digunakan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru menggunakan pendekatan personal dan instansi yang meliputi kerjasama dengan bawahan untuk mencapai tujuan bersama dan pendekatan situasional. Motivasi yang diberikan kepala sekolah terhadap para guru dengan pengaturan lingkungan yang kondusif, suasana kerja yang tenang, dan menanamkan disiplin kepada semua bawahannya. Strategi yang dijalankan oleh kepala sekolah meliputi peningkatan profesi melalui pelatihan, seminar, workshop, lokakarya dan yang lainnya, Memberi kesempatan untuk melakukan studi lanjut, memperhatikan kebutuhan guru dan yang lainnya.

- 2. Kepemimpinan Kepala Madrasah (Studi tentang Peningkatan Guru Madrasah Aliyah Al-Wathoniyah Semarang). Tesis Choirul Anwar Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kepemimpinan kepala madrasah dalam upaya peningkatan profesionalisme guru di madrasah. Hasil penelitiannya adalah kepemimpinannya besifat humanis dan karismatik yang didasarkan pada pola interaksi antara pimpinan dan bawahan, yang tidak saklek dan men-jugjment kepada bawahan apabila melakukan kesalahan. Hanya saja ia tegas dalam memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
- 3. Manajemen Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Tesis Mahmuddin Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Hasil dari penelitian ini kepala sekolah berupaya semaksimal mungkin menjalankan fungsinya yaitu sebagai edukator, manajer, administrator dan supervisor, sehingga hasilnya dapat meningkatkan profesionalisme guru.

F. Kerangka Pemikiran N GUNUNG DJATI

Kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi⁹. Pemimpin di sekolah adalah kepala yang harus berupaya memajukan sekolah agar berkinerja baik yaitu dengan melakukan pembinaan kepada guru. Pembinaan tersebut dilakukan, karena guru merupakan orang yang bertanggung jawab langsung dalam pembelajaran. Sementara itu pembelajaran yang bermutu merupakan salah satu indikator keberhasilan sekolah. Pembelajaran yang bermutu akan menyebabkan pendidikan secara umum bermutu. Oleh karena itu mutu

⁹ Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Teori, Model & Aplikasi (Jakarta: Grasido, 2013), hal. 9.

pendidikan nasional banyak ditentukan pembelajaran yang bermutu yang dilaksanakan para guru di kelas. Supaya pembelajaran itu bermutu, maka gurunya juga harus bermutu. Di dalam konteks ini pembinaan kepala sekolah terhadap guru menjadi sesuatu yang penting.

Pembinaan kepala sekolah terhadap guru dalam upaya meningkatkan profesionalismenya dilakukan melalui komunikasi dua arah yang penuh dengan kehangatan. Hal ini penting terjadi saling pengertian di antara kedua belah pihak. Kepala sekolah paham akan perannya sebagai pembina langsung guru di sekolah sementara guru juga menyadari akan perannya sebagai pelaksana pembelajaran secara langsung di dalam kelas. Gurulah yang secara langsung mengadakan interaksi di depan kelas dengan para siswa.

Guru profesional faham betul para siswa yang dihadapinya. Oleh karena itu ketika mengajar selalu memperhatikan karakteristik siswa. Mengetahui karakteristik siswa ini penting untuk menentukan bahan ajar yang akan diberikan. Seorang pendidikn tidak boleh berhenti membentuk suasana pembelajaran yang kondusif bagi peserta didik supaya kualitas hasil belajarnya meningkat.

Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara itu, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Sedangkan Hamalik mengemukakan bahwa guru profesional merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat master serta telah mendapat ijazah negara dan telah berpengalaman dalam mengajar pada kelas-kelas besar.

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti yang diungkapkan Supriadi bahwa ada kaitan yang erat antara mutu kepala sekolah dengan berbagai aspek kehidupan sekolah seperti disiplin sekolah, iklim budaya sekolah dan menurunnya perilaku nakal peserta didik.¹⁰

Dalam pada itu, dikeluarkannya berbagai kebijakan tentang peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan bukti betapa seriusnya pemerintan Indonesia dalam mendorong peningkatan profesionalisme guru. Salah satunya adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU ini kemudian dijabarkan lagi dalam berbagai peraturan di antaranya:

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; dan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.¹¹

Apa yang diungkapkan di atas menjadi lebih penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan guru, yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien. Di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi seni, dan budaya yang diterapkan dalam pendidikan di sekolah juga cenderung bergerak maju semakin pesat, sehingga menuntut penguasaan secara professional.

Menyadari hal tersebut, setiap kepala sekolah di hadapkan pada tantangan untuk melaksanakan pengembangan pendidikan secara terarah, berencana, dan

¹⁰E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 24.

Nanang Priatna, *Pengembangan Profesi Guru*, (Bandung: Rosda, 2013), hal. xiv.

berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam kerangka inilah dirasakan perlunya peningkatan manajemen kepala sekolah secara professional untuk menyukseskan program-program pemerintah yang sedang digulirkan. Yakni otonomi daerah, desentralisasi dan sebagainya, yang kesemuanya ini menuntut peran aktif dan kinerja profesionalisme kepala sekolah.

Strategi ini merupakan usaha sistematis dan terkoordinasi untuk secara terus menerus memperbaiki kualitas layanan, sehingga fokusnya di arahkan ke pelanggan dalam hal ini peserta didik, orang tua peserta didik, pemakai lulusan, guru, karyawan, pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 kepala sekolah dituntut memiliki sekurang-kurangnya lima kompetensi. Kelima kompetensi itu adalah 1) kepribadian, 2) manajerial, 3) kewirausahaan, 4) supervisi, dan 5) sosial.

Terkait dengan kepemimpinan sekolah, Wahjosumidjo mendefinisikan kepala madrasah sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu madrasah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran". ¹²

Kepala sekolah sebagai yang bertanggungjawab di madrasah mempunyai kewajiban menjalankan madrasahnya. Ia selalu berusaha agar segala sesuatu di madrasahnya dapat berjalan lancar. Dengan kata lain kepala sekolah harus berusaha agar semua potensi yang ada di madrasahnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan agar tujuan sekolah dapat dicapai dengan sebaik-baiknya pula.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa peran kepala sekolah sebagai leader, harus memiliki beberapa kemampuan yang meliputi kemampuan baik dari segi kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi dan misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan berkomunikasi.

Adapun menurut Wijono, tugas seorang kepala sekolah secara garis besar dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu administrasi material, administrasi

¹²Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 83.

personel dan administrasi kurikulum. Administrasi material adalah administrasi yang menyacup bidang-bidang material sekolah seperti ketatausahaan sekolah, keuangan, pergedungan, perlengkapan, dan lain-lain. Administrasi personel adalah administrasi yang mencakup administrasi keguruan, kemuridan, dan pegawai sekolah lainnya. Administrasi kurikulum adalah administrasi yang mencakup penyusunan kurikulum, pembinaan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum. Kepemimpinan dan administratif pendidikan yang berhasil bagi kepala sekolah adalah diarahkan pada pengembangan aktifitas pengajaran dan belajar siswa.

Oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut tak lepas dari peran kepala sekolah sebagai pengelola dalam lembaga pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan peran kepala madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sini adalah usaha-usaha yang dilakukan kepala madrasah untuk mencapai kemajuan dan kesempurnaan pendidikan yang dipercayakan kepadanya. Pengejawantahan visi misi kepala sekolah diberikan kepada guru sebagai orang yang berinteraksi langsung dengan peserta didik di dalam kelas.

Dalam pendidikan di sekolah, tugas guru sebagian besar adalah mendidik dengan cara mengajar. Tugas pendidik di dalam rumah tangga sebagian besar, bahkan mungkin seluruhnya, berupa membiasakan, memberikan contoh yang baik, memberikan pujian, dorongan, dan lain-lain yang diperkirakan mengasilkan pengaruh positif bagi pendewasaan anak. Jadi, secara umum, mengajar hanyalah sebagian dari tugas mendidik.¹⁴

Pendidikan akan sangat terasa gersang apabila tidak berhasil mencetak sumber daya manusia yang berkualitas (baik segi spiritual, intelegensi, dan skill). Sehingga diperlukan peningkatan mutu pendidikan supaya bangsa ini tidak tergantung pada status bangsa yang sedang berkembang tetapi bisa menyandang predikat bangsa maju. ¹⁵ Untuk memperbaiki kehidupan bangsa harus dimulai dari

¹³Wijono, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1989, 18.

¹⁴Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 78-79 .

¹⁵M. Joko Susilo, *Pembodohan siswa tersistematis*, (Yogyakarta: PINUS Book Publiser, 2007), hal. 4

penataan dalam segala aspek dalam pendidikan, mulai dari aspek tujuan, sarana, pembelajaran, manajerial dan aspek lain yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pendidikan yang mampu meyiapkan Sumber Daya Manusia yang memiliki moralitas yang tinggi. Karena bagaimanapun juga Pendidikan dan moral adalah dua pilar yang sangat penting bagi teguh dan kokohnya suatu bangsa. Dua pilar ini perlu untuk dipahami secara mendalam dan bijaksana oleh semua elemen bangsa ini dari masyarakat maupun pemegang kebijakan dan pelaksana pendidikan. Dalam suatu negara yang sedang berusaha lepas dari badai krisis, sangatlah tepat apabila kita mencoba untuk melihat kembali posisi dan interrelasi dua pilar ini bagi bangsa Indonesia.

Pendidikan merupakan salah satu media yang paling efektif untuk melahirkan generasi yang memiliki pandangan yang mampu menjadikan keragaman sebagai bagian yang harus diapresiasi secara konstruktif.Pendidikan dengan paradigm pluralis —multikultural menjadi kebutuhan yang amat mendesak untuk dirumuskan dan didesain dalam pembelajaran.Pendidikan semacam ini memiliki konstribusi dan nilai signifikan untuk membangun pemahaman juga kesadaran terhadap substansi dan nilai-nilai pluralis-multikulturalitas.¹⁷

Pendidikan sejatinya merupakan proses pembentukan moral masyarakat beradab, masyarakat yang tampil dengan wajah kemanusiaan dan pemanusiaan yang normal. Artinya, pendidikan yang dimaksudkan di sini lebih dari sekedar sekolah (*education not only education as Schooling*) melainkan pendidikan sebagai jaring-jaring kemasyarakatan (*education as community networks*).¹⁸ Pendidikan diharapkan bisa memberikan sebuah kontribusi positif dalam membentuk manusia yang memiliki keseimbangan antara kemampuan intelektual dan moralitas.

¹⁶Saekhan Muchits, *Pembelajaran Kontekstual*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2008), hal. 3

¹⁷Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, (Jogjakarta: Arr Ruzz Media, 2011), hal. 8-9.

¹⁸Sudarwan Danim, *Agenda Pembaharuan sistem pendidikan*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2003), hal. 63-64.

Realitas tersebut mendorong timbulnya berbagai gugatan terhadap efektifitas pendidikan agama yang selama ini dipandang oleh sebagian besar masyarakat telah gagal, sebagaimana penilaian Mochtar Buchori bahwa kegagalan pendidikan agama ini disebabkan karena praktik pendidikannya hanya memperhatikan aspek kognitif semata dari pertumbuhan nilai-nilai (agama), dan mengabaikan pembinaan aspek afektif dan konatif-volitif, yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.¹⁹

Krisis tersebut bersumber dari krisis moral, akhlak (karakter) yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pendidikan. Krisis karakter yang dialami bangsa saat ini disebabkan oleh kerusakan individu-individu masyarakat yang terjadi secara kolektif sehingga menjadi budaya. Budaya inilah yang menginternal dalam sanubari masyarakat Indonesia dan menjadi karakter bangsa.Ironis, pendidikan yang menjadi tujuan mulia justru menghasilkan output yang tidak diharapkan.²⁰

Pendidikan moral menjadi sangat penting bagi teguh dan kokohnya suatu bangsa. Pendidikan moral adalah suatu proses panjang dalam rangka mengantarkan manusianya untuk menjadi seorang yang memiliki kekuatan intelektual dan spiritual sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya di segala aspek dan menjalani kehidupan yang bercita-cita dan bertujuan pasti. Hal ini harus menjadi agenda pokok dalam setiap proses pembangunan bangsa. Pendidikan moral ini bisa diaplikasikan pada penanaman nilai-nilai agama di sekolah. Untuk mewujudkan pendidikan ini, maka penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan penanaman nilai-nilai religius dalam segala aspek aktivitas belajar. Melihat fenomena di atas maka solusi yang ditawarkan adalah pengembangan profesionalisme guru di lembaga pendidikan sangat diperlukan. Tentunya untuk mengembangkan ini yang berperan adalah kepala sekolah, ia

¹⁹Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam; Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 182.

Persada, 2009), hal. 182.

²⁰Agus Zaenal Fitri, *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah*, (Jogjakarta: Ar-ruz Media, 2012), hal. 10-11.

²¹Ahmad Ubaidillah, *Krisis Moral dan Kehancuran Bangsa*, lampung pos, 25 Juni 2011.

harus betul-betul optimal mewujudkan profesionalisme guru dengan manajemen yang baik.

Manajemen dalam prakteknya membutuhkan berbagai fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang terdapat dalam peningkatan profesionalisme guru meliputi fungsi perencanaan atau *planning*, fungsi pengorganisasian atau *organizing*, fungsi pengarahan atau *directing*, dan fungsi pengendalian atau *controlling*.²² Perencanaan (*Planning*) Ini adalah fungsi paling awal dari semua fungsi manajemen, para ahli juga menyutujui hal tersebut. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menyajikan secara sistematis segala kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.²³

Perencanaan dapat diartikan sebagai penetapan tujuan, *budget*, *policy* prosedur, dan program suatu organisasi. Dengan adanya perencanaan, fungsi manajamen berguna untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai, menetapkan biaya, menetapkan segala peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan.

Pengorganisasian (*Organizing*) adalah lanjutan dari fungsi perencanaan. Bagi suatu lembaga atau organisasi, pengorganisasian merupakan urat nadi organisasi. Oleh sebab itu keberlangsungan organisasi atau lembaga sangat dipengaruhi oleh pengorganisasian. Pengorganisasian menurut Heidjarachman Ranupandojo adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, pelaksanaannya dengan membagi tugas, tanggung jawab, serta wewenang di antara kelompoknya, ditentukan juga yang akan menjadi pemimpin dan saling berintegrasi dengan aktif.²⁴

Penggerakan (Actuating) berfungsi untuk merealisasikan hasil pengorganisasian. Actuating merupakan perencanaan dan usaha untuk mengarahkan atau menggerakan tenaga kerja atau *man* power dan mendayagunakan fasilitas yang tersedia guna melakasanakan pekerjaan secara bersamaan. Fungsi ini memotifasi bawahan atau pekerja untuk bekerja dengan

²² Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004) hal.12

²³ Hikmat, Manajemen Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 34

²⁴ Majid, Abdul , *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru.* (Bandung: Rosdakarya, 2012) , hal. 32

sungguh-sungguh supaya tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan efektif. Fungsi ini sangat penting untuk merealisasikan tujuan organisasi.

Pengawasan (*Controlling*) merupakan kegiatan untuk mengamati dan mengukur segala kegiatan operasi dan pencapaian hasil dengan membandingkan standar yang terlihat dalam rencana sebelumnya. Fungsi pengawasan menjamin segala kegiatan berjalan sesuai dengan kebijaksanaan, strategi, rencana, keputusan dalam program kerja yang telah dianalisis, dirumuskan serta ditetapkan sebelumnya. Untuk lebih ringkasnya, kerangka berpikir penelitian in dapat penulis sajikan seperti di bawah ini:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

MANAJEMEN PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU (Studi tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah SMA Al-Ittihad Karangtengah Cianjur)

